



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 09/HK.03.1/5320/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

di...

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 06/ORT.07/5320/ 2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan

g). Tim Pelayanan Publik...

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

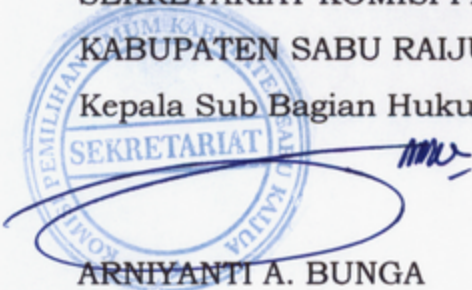
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ARNIYANTI A. BUNGA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 09/HK.03.1/5320/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Alpius P.Saba	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Daud Pau	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
3.	Kirenius Padji	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
4.	Agustinus V. Mone	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
5.	Susana V. Edon	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Jeferson A. Nalanan NIP. 19780126 200902 1001	Sekretaris	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Arniyanti A. Bunga,SH.M.Si NIP:19870811 201012 2004	Kepala Subbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
2.	Arfaksat Hun NIP.19680430 1999203 1005	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	-Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Serafianus Thomas Atu. S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1 002	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Arniyanti A. Bunga,SH. M.Si NIP:19870811 201012 2004	Kepala Subbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
2.	Arfaksat Hun NIP.19680430 19992031005	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	-Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis di
3.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1002	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	

5.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sabu Raijua .
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Arfaksat Hun NIP.1968043019992031005	Plt. Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi
2.	Septian O. Bokotei,SH NIP.199009162020121006	Staf	Anggota	
3.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
5.	Marianus Sula Kromen NIP.19760501 200604 011	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1 002	Kepala Subbag Program dan Data	Kordinator merangkap anggota	Mengkoordinas ikan dan menyiapkan dokumen SOP <i>core bussines</i> . Mengkoordinas ikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
3.	Ferdinan Tary NIP 198302182007011005	Staf	Anggota	
4.	Kembara A. Yuda Nggadas NIP 199103072019031006	Staf	Anggota	
5.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	

V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Arniyanti A. Bunga,SH. M.Si NIP.19870811 201012 2004	Kepala Subbag hukum	Kordinator merangkap anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.
2.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
3.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi  Menerapkan system penilaian kinerja individu  Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik
4.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
5.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Arfaksat Hun NIP.1968043019992031005	Plt. Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI  Meningkatkan peran aparat peran aparat pengawasan intern
2.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	
3.	Marianus Sula Kromen NIP.19760501 200604 011	Staf	Anggota	

4.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
5.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP.19851011 2010121002	Kepala Subbag Program dan Data	Kordinator merangkap anggota	-membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sabu Raijua
2.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
3.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
4.	Ferdinan Tary NIP 198302182007011005	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Arfaksat Hun NIP.196804301999203 1005	Kepala Subbag Teknis	Kordinator merangkap anggot	Menerapkan standar layanan dalam pelayanan publik.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pelayanan publik.
2.	Septian O. Bokotei,SH NIP.199009162020121006	Staf	Anggota	
3.	Kembara A. Yuda Nggadas NIP 199103072019031006	Staf	Anggota	
4.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	
5.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	
X.	Tim Agen Perubahan			
1.	Jeferson A. Nalanan NIP. 19780126 200902 1001	Sekretaris	Ketua	-membuat rencana aksi

2.	Arfaksat Hun NIP.196804301999203 1005	Kepala Subbag Teknis	Wakil Ketua dan Koordinator bagian PDOS	dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan bersama Tim Reformasi Sekretariat
3.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP.19851011 201012 1 002	Kepala Subbag Program dan Data	Anggota	-
4.	Arniyanti A. Bunga,SH. M.Si NIP.198708112010122004	Kepala Subbag Hukum	Anggota	merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi -melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan perilaku dan mental yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Seba



Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
  
ARNIYANTI A. BUNGA

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
 TAHUN 2022

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET 18		
					Jan 6	Feb 7	Mar 8	Apr 9	Mei 10	Jun 11	Jul 12	Agus 13	Sep 14	Okt 15	Nov 16	Des 17			
1	Manajemen Perubahan	1). Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Biro pada Sekretariat KPU Kab. Sabu Raijua Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan	Sik Tim Reformasi Birokrasi KPU Kab. Sabu Raijua		√													
		2). Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Sosialisasi nilai-nilai untuk meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN		√													

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<p>2. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja:</p> <p>1) Pemandangan PAKTA ASN</p> <p>2. Persentase (%) pelaporan LHKPN</p> <p>3. Persentase (%) pelaporan LHKASN</p> <p>4. Dokumen Laporan penanganannya bentuk kepenging berikut dokumentasi:</p> <p>a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan</p> <p>b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan</p>	<p>1. Persentase (%) pendaftar dan PAKTA Integritas baik Anggota dan ASN</p> <p>2. Persentase (%) pelaporan LHKPN</p> <p>3. Persentase (%) pelaporan LHKASN</p> <p>4. Dokumen Laporan penanganannya bentuk kepenging berikut dokumentasi:</p> <p>a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan</p> <p>b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan</p>														
			<p>4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/ satuan kerja</p>	<p>1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/ satuan kerja;</p> <p>2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;</p>														
			<p>4. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik:</p> <p>1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan kerja</p>	<p>1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan unit/ satuan kerja;</p> <p>2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/ satuan kerja;</p>														
		3).	<p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja</p> <p>2. Terlaksananya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit</p>														

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Ok	Nov	Des	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	1). Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua 2). Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Keputusan, BA dan perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diaharmoni 3). Pengelolaan JDIH	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Sabu Raijua Melakukan revisi terhadap produk hukum (Keputusan, BA dan perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	1. Tim RB membuat laporan yang terdiri atas: a. SK Tim RB, Tim Agen perubahan b. Rencana Aksi Tahunan RB di lingkungan unit kerja/ satuan kerja c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); 2. Tersedianya dokumenindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Penyesuaian SOTK	Pengelolaan JDIH KPU Kab. Sabu Raijua	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi KPU Kab. Sabu Raijua		√											
4	Penataan Tata laksana	1). Peningkatan tata laksana SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua	Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kab. Sabu Raijua	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP. 2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP. 3. SOP sudah diegalikan; dan 4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.		√	√	√	√	√							

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Evaluasi SOP	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2). Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/ Satuan Kerja: 1. Penyempurnaan Kebijakan/ Maktumat Layanan/ Standar Pelayanan/ SOP PID di lingkungan satuan kerja 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5. Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maktumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/peleaksan aan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan pemohon informasi.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3). Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekrataratan: 1) Aplikasi tata naskah dinas 2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3) Aplikasi Perencanaan 4) Aplikasi penganggaran 5) Aplikasi Keuangan 6) Aplikasi Manajemen Kinerja 7) Aplikasi Pengadaan	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan; 2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian. 3. Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan 4. Tersinya data aplikasi Penganggaran 5. Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan 6. Tersinya aplikasi manajemen kinerja 7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1. Dapat dilaksanakannya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 2. Aplikasi Dokumentasi informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui; 3. Dapat dilaksananya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan; 4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengujung bagi aplikasi yang bias dilaksas publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4). Penerapan sistem	1). Penerapan sistem arsip	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital 2. Terdokumentasinya arsip vital		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1). Pembangunan Sistem Merit	kearraipan yang handal Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading 4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan individu/pemberian reward and punishment		√											√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penetapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pengembangan pegawai	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan						√							√
			bertarbiah kompeten Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/ satuan kerja.						√	√	√					
		2). Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1). Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja  3. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih 3. Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difocusing	√											
6	Penguatan Akuntabilitas			Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)														
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja	% Capaian kinerja		√													
			Kinerja Pelaporan Kinerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja 2. Reritu Lakip Pelaporan kinerja kerja tepat waktu		√													
		2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi Elapkin Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	1. Tersinya aplikasi elapkin 2. Data e-Lapkin termutakhir 1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ bersertifikat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	Penguasaan	1). Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kab. Sabu Raijua	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 2. sosialisasi dan internalisasi atas peraturan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua 3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian	Adanya UPG adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan laporan pengendalian gratifikasi		√		√		√			√				√		
		2). Peningkatan SPIP	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen 2. Pelaksanaan SPIP 3. Pelaksanaan SPIP 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Adanya tim SPIP Terselektasinya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern		√													

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)														
					Jen 6	Feb 7	Mar 8	Apr 9	Mai 10	Jun 11	Jul 12	Agust 13	Sep 14	Ok 15	Nov 16	Des 17	KET 18		
1	2	3	4	5															
					Pelaporan Buku Kendali tepat waktu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3). Peningkatan Individu	Integrasi	Penyempulan LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN		√												
				Penyempulan LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Sabu Raijua		√	√											
8	Manajemen Pelayanan Publik	1) Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/ satuan kerja	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesejahteraan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemulian)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/ satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan); 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/ satuan kerja 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Menurunnya jumlah pemanggungan kode etik ASN dan Kode etik 5. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah				√			√								√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Oktr	Nov	Des	KEP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2)	Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepembinaan dan administrasi di lingkungan unit/ satuan kerja.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Peryaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Serana dan prasarana 9) Peningkatan Penguduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3)	Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	1). Adanya kerjasama dengan stakeholder terkait 2). Terlaksananya sosialisasi kegiatan pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Seba  
Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RALJUA

tttd.

ALPIUS P. SABA



Selahan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RALJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ARNIYANTI A. BUNGA